



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) TAHUN 2023

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

1.2 LATAR BELAKANG

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas mengemban 2 (dua) krida dari Hasta Krida Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.

Tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas adalah meningkatkan produksi tanaman pertanian, meningkatkan penguatan cadangan pangan dan meningkatkan ketersediaan pangan utama. Sedangkan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas adalah meningkatnya ketahanan pangan, meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian, meningkatnya

produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, meningkatnya produksi tanaman perkebunan serta meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, Sumber Daya Manusia Pertanian dan akses pasar.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD Tahun 2018-2023, Renstra, Renja maupun Perjanjian Kinerja.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RTP pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas adalah :

- a. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- e. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk

mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.5 MANFAAT

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- b. Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- c. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- d. Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

1.6 RUANG LINGKUP

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk tahun 2023 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas: (1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; (2) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi; (3) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota; (4) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota; (5) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian; (6) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota; (7) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; (8) Pembangunan Prasarana Pertanian; dan (9) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepemdagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).

1.7 IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH.

Penyusunan RTP Tahun 2023 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan tersebut, Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- 1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 - b) Sub kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan;
 - c) Sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dari Toko Tani Indonesia;
- 2) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi :
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun;
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun;

- c) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- b. Program Penanganan Kerawanan Pangan**
 - 1) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota :
 - a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Program Pengawasan Keamanan Pangan**
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.**
 - 1) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian :
 - a) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;
 - b) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota :
 - a) Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman;
- e. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.**
 - 1) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
 - a) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;
 - b) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian;
 - c) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;

- d) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit;
- e) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage;
- f) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya;

f. Program Penyuluhan Pertanian.

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
 - b) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
 - c) Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota;
 - d) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;

g. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

- 1) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota :
 - a) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - b) Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1 PENGERTIAN SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2 TUJUAN SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3 UNSUR - UNSUR SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- 1) Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- 2) Penilaian risiko strategis OPD; dan
- 3) Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan

pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian :

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit :

- 1) Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- 2) Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- 3) Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan kebijakan dan prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi resiko-resiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik

2.4 PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (*Statement of Responsibilities*)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1 LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas bertujuan untuk :

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2 KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut :

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Kurang Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Kurang Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Kurang Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian Pengendalian tersebut di atas hanya 3 (tiga) sub unsur yang memadai yaitu sub unsur pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, perwujudan APIP yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait. Sedangkan 5 (lima) sub unsur lain masih kurang memadai.

Adapun kelemahan-kelemahan yang masih pada 5 (lima) sub unsur tersebut adalah :

a. Sub unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Kelemahan :

- 1) Belum terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik;

b. Sub Unsur Komitmen terhadap Kompetensi

Kelemahan :

- 1) Belum ada pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala;

c. Sub Unsur Kepemimpinan yang Kondusif

Kelemahan :

- 1) Pimpinan belum membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah;
 - 2) Gaya pimpinan tidak mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja;
- d. Sub Unsur Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan
- Kelemahan :
- 1) Masing-masing pihak dalam organisasi belum memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko;
 - 2) Belum adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko;
- e. Sub Unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
- Kelemahan :
- 1) Belum adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja).

3) RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu :

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika		
	Membentuk fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	Kepala Dinas	Triwulan II tahun 2023
2	Komitmen terhadap Kompetensi		
	Mengadakan pelatihan terkait	Kepala Dinas	Triwulan III Tahun

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
	pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala		2023
3.	Kepemimpinan yang Kondusif		
	a. Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah dengan memimpin rapat-rapat secara pribadi/tidak mewakilkan	Kepala Dinas	Triwulan I, II Tahun 2023
	b. Pimpinan memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja melalui evaluasi kinerja pegawai secara berkala melalui pembinaan pegawai	Kepala Dinas	Triwulan III tahun 2023
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan		
	a. Pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan resiko	Kepala Dinas	Triwulan I, II tahun 2023
	b. Pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko dilakukan secara transparan tepat waktu melalui rapat koordinasi	Kepala Dinas	Triwulan II, IV Tahun 2023
5	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan		
	Penyusunan aturan pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	Kepala Dinas	Triwulan III Tahun 2023

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I :

Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan

*Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas*

*Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian
Intern Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Banyumas*

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1 PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Bupati Banyumas Periode 2018-2023 telah menetapkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi tersebut adalah “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 8 (delapan) misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;

- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Kedelapan misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas mendukung misi ke-3 dan ke-4 Bupati Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu :

- a. misi ke-3 “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan”
- b. misi ke-4 “Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor kedalutan Pangan”

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

No	Konteks	Sasaran Strategis / kegiatan	Indikator
1.	Risiko Strategis	Meningkatnya penguatan cadangan pangan	Persentase penguatan cadangan pangan
		Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan
		Meningkatnya keamanan pangan	Persentase peningkatan jumlah sampel pangan yang diuji dalam rangka keamanan pangan
		Meningkatnya diversifikasi pangan	Persentase peningkatan komoditas pangan lokal yang dikembangkan
		Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian	Persentase peningkatan ketersediaan sarana pendukung produksi pertanian Persentase peningkatan ketersediaan sarana pendukung produksi pertanian
		Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pendukung Produksi Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok

No	Konteks	Sasaran Strategis / kegiatan	Indikator
		Meningkatnya hasil penanganan bencana pertanian	Persentase peningkatan penanganan bencana pertanian
2	Resiko Operasional	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah lokasi kemandirian pangan yang difasilitasi
		Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah kegiatan Penetapan target konsumsi pangan Jumlah Kegiatan Pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan survey pengamanan pangan
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian yang dilaksanakan
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian untuk pembinaan kelembagaan petani yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan

No	Konteks	Sasaran Strategis / kegiatan	Indikator
			Jumlah kegiatan Training Penyuluh Pertanian Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa melalui penyuluhan pertanian
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Jenis Infrastruktur di Bidang Pertanian
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

Form 2.a : Penetapan konteks risiko strategis Pemda

Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis OPD

*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Banyumas*

*Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas*

4.2 IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Rincian hasil identifikasi risiko dapat dilihat pada lampiran :

Form 3.b : Identifikasi Risiko Strategis Dinperten KP

Form 3.c : Identifikasi Risiko Operasional Dinperten KP

4.3 RESIKO OPERASIONAL

a. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai tinggi. Berikut adalah daftar risiko prioritas dari hasil analisis risiko Dinperten KP Kabupaten Banyumas :

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Skala Resiko
	Resiko Strategis		
1	Tidak tertanganinya serangan OPT pada tanaman	RSO.23.327.22.22	8.64
2	Tidak tertanganinya daerah rawan pangan	RSO.23.209.22.22	8.75
3	Rendahnya kapasitas kelompok tani	RSO.23.327.22.22	8.96
4	Tidak tersedianya air bagi lahan pertanian	RSO.23.327.22.22	9.50
	Resiko Operasional		
1	Masyarakat tidak mengetahui mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang beredar dan dikonsumsi	RSO.23.209.22.22	8.7
2	Kurang fasilitasi Gedung dan lahan demplot BPP	RSO.23.327.22.22	8.12
3	Ketergantungan petani terhadap pestisida kimia dalam penanggulangan serangan OPT	RSO.23.327.22.22	10.2
4	Pasokan dan harga pangan tidak stabil	RSO.23.209.22.22	8.12
5	Cadangan pangan masyarakat kurang memadai	RSO.23.209.22.22	8.12

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Dinperten KP membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran :

Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas.

Penilaian terhadap pengendalian mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika :

- 1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- 2) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- 3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- 4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran :

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

BAB V

KEGIATAN PENGEDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun pengendalian meliputi :
 - b. Mengumpulkan data berupa RTP, peraturan perundang-undangan, kebijakan Pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan pengendalian yang akan dibangun;
 - c. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - d. Membuat atau menyempurnakan pengendalian;
 - e. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - f. Menyempurnakan rancangan pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - g. Menetapkan penerapan pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian Terhadap semua bentuk pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi :

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran :

Form 8 (kolom a – f). Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2023 ketika akan merealisasikan RTP.

BAB VIII

P E M A N T A U A N

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran, yaitu *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran yaitu, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, 11 April 2023

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS**



Ir. JAKA BUDI SANTOSA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650606 199403 1 008

LAMPIRAN

HASIL CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)														KESIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	Modus	
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA															Kurang Memadai
1	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	4	3	Memadai
2	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	2	3	2	3	3	3	2	2	3	2	3	2	4	2	Kurang Memadai
3	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	Memadai
4	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	2	3	3	3	3	3	3	1	3	2	3	3	4	3	Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI															Kurang Memadai
1	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	2	3	2	2	3	3	1	2	3	2	2	2	3	2	Kurang Memadai

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)														KESIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	Modus	
2	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai
3	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	3	2	3	Memadai
4	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	2	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3	3	Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF															Kurang Memadai
1	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	2	3	2	3	3	3	2	2	3	2	3	3	4	3	Memadai
2	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	2	3	3	3	2	2	3	2	2	2	4	2	Kurang Memadai
3	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	2	3	2	2	3	3	2	2	3	2	2	3	1	2	Kurang Memadai

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)														KESIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	Modus	
4	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	2	3	2	3	3	3	3	4	3	2	3	3	4	3	Memadai
5	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	Memadai
6	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	4	3	Memadai
7	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3	Memadai
8	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	2	3	2	3	3	3	2	2	3	2	3	3	4	3	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN															Kurang Memadai
1	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	4	2	2	3	Memadai

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)														KESIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	Modus	
2	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	Memadai
3	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2	3	2	2	3	3	2	2	3	2	3	3	4	2	Kurang Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2	3	2	2	2	3	3	2	3	2	4	2	4	2	Kurang Memadai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT															Memadai
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	4	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	2	4	3	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	2	3	2	3	3	3	2	2	3	2	3	3	4	3	Memadai

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)														KESIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	Modus	
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA															Kurang Memadai
1	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	3	2	2	3	3	2	2	3	2	3	2	4	2	Kurang Memadai
2	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	Memadai
3	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	3	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	4	2	Kurang Memadai
4	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2	1	3	4	3	Memadai
5	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	4	3	Memadai
6	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	3	4	3	Memadai

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)														KESIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	Modus	
7	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	3	2	3	3	3	3	3	1	2	3	3	4	3	Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF															Memadai
1	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	3	3	3	2	2	4	3	3	3	4	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Memadai
4	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)														KESIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	Modus	
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT															Memadai
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	1	3	4	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	Memadai

**CEE BERDASARKAN DOKUMEN KONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian : 2023
Urusan : Pertanian dan Pangan

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	LHE SAKIP	Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment untuk implementasi pengukuran kinerja	Dinpartan KP telah melakukan perbaikan dalam sistem manajemen kinerja	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
2	Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2020	Terdapat pengelolaan aset yang belum sesuai ketentuan	Petugas Pengelola Barang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
3	Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2020	Terdapat PNS yang tidak mentaati ketentuan jam kerja	Telah dilakukan pembinaan pegawai dan sosialisasi ASN Berakhlak	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan

Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**SURVEI SIMPULAN PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2023
 Urusan : Pertanian dan Pangan

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	Kurang Memadai	Terdapat PNS yang tidak mentaati ketentuan jam kerja	Kurang Memadai	Belum terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	Kurang Memadai	Terdapat PNS yang tidak mentaati ketentuan jam kerja Belum terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	Kurang memadai	Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment untuk implementasi pengukuran kinerja Terdapat pengelolaan aset yang belum sesuai ketentuan	Kurang Memadai	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	-	Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment untuk implementasi pengukuran kinerja Terdapat pengelolaan aset yang belum sesuai ketentuan Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	-	-	Kurang Memadai	Pimpinan belum membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah - Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	Kurang Memadai	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah - Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	Memadai	-	Kurang Memadai	Masing-masing pihak dalam organisasi belum memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	Kurang Memadai	Masing-masing pihak dalam organisasi belum memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko
					Tidak adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko		Tidak adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	Memadai	-	Memadai		Memadai	-
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kurang Memadai	-	Kurang Memadai	Belum adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) - OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Kurang Memadai	Belum adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) - OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	-
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	-

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas																
Tahun Penilaian	: 2022																
Periode Yang dinilai	: RPJMD Perubahan 2018-2023																
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar : Urusan Pemerintahan Pilihan																
OPD yang Dinilai	: DINPERTAN KP																
Sumber Data	: Renstra Perubahan 2018-2023																
Tujuan Strategis	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama Meningkatnya Akses Pangan Meningkatnya Pemanfaatan Pangan Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian																
Sasaran Strategis	Meningkatnya Keamanan Pangan Meningkatnya Diversifikasi Pangan Meningkatnya Penguatan Cadangan Pangan Meningkatnya Penanganan Daerah rawan Pangan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Pertanian Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pendukung Produksi Pertanian Meningkatnya Hasil Penanganan Bencana Pertanian																
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	IKU <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>Persentase peningkatan ketersediaan sarana pendukung produksi pertanian : 50 %</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Persentase peningkatan jumlah sampel pangan yang diuji dalam rangka keamanan pangan : 5 %</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Persentase Penguatan Cadangan Pangan : 86 %</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Persentase Penanganan daerah rawan pangan : 67 %</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Persentase peningkatan komoditas pangan lokal yang dikembangkan : 30 %</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Persentase peningkatan ketersediaan prasarana pendukung produksi pertanian : 50 %</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Persentase peningkatan kelas kelompok : 7 %</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Persentase peningkatan penanganan bencana pertanian : 1 %</td></tr> </table>	1	Persentase peningkatan ketersediaan sarana pendukung produksi pertanian : 50 %	2	Persentase peningkatan jumlah sampel pangan yang diuji dalam rangka keamanan pangan : 5 %	3	Persentase Penguatan Cadangan Pangan : 86 %	4	Persentase Penanganan daerah rawan pangan : 67 %	5	Persentase peningkatan komoditas pangan lokal yang dikembangkan : 30 %	6	Persentase peningkatan ketersediaan prasarana pendukung produksi pertanian : 50 %	7	Persentase peningkatan kelas kelompok : 7 %	8	Persentase peningkatan penanganan bencana pertanian : 1 %
1	Persentase peningkatan ketersediaan sarana pendukung produksi pertanian : 50 %																
2	Persentase peningkatan jumlah sampel pangan yang diuji dalam rangka keamanan pangan : 5 %																
3	Persentase Penguatan Cadangan Pangan : 86 %																
4	Persentase Penanganan daerah rawan pangan : 67 %																
5	Persentase peningkatan komoditas pangan lokal yang dikembangkan : 30 %																
6	Persentase peningkatan ketersediaan prasarana pendukung produksi pertanian : 50 %																
7	Persentase peningkatan kelas kelompok : 7 %																
8	Persentase peningkatan penanganan bencana pertanian : 1 %																
Informasi Lain	-																
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 1: Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama Sasaran 1.1: Meningkatkan Penguatan Cadangan Pangan Ind Sasaran 1.1.1: Persentase Penguatan Cadangan Pangan Program 1.1.1.1: PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Tujuan 2: Meningkatkan Akses Pangan Sasaran 2.1: Meningkatkan Penanganan Daerah rawan Pangan Ind Sasaran 2.1.1: Persentase Penanganan daerah rawan pangan Program 2.1.1.1: PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Tujuan 3: Meningkatkan Pemanfaatan Pangan Sasaran 3.1: Meningkatkan Keamanan Pangan																

Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko

Ind Sasaran 3.1.1: Persentase peningkatan jumlah sampel pangan yang diuji dalam rangka keamanan pangan
Program 3.1.1.1: PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
Sasaran 3.2: Meningkatnya Diversifikasi Pangan
Ind Sasaran 3.2.1: Persentase peningkatan komoditas pangan lokal yang dikembangkan
Program 3.2.1.1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Tujuan 4: Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian
Sasaran 4.1: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Pertanian
Ind Sasaran 4.1.1: Persentase peningkatan ketersediaan sarana pendukung produksi pertanian
Program 4.1.1.1: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Ind Sasaran 4.1.2: Persentase peningkatan ketersediaan prasarana pendukung produksi pertanian
Program 4.1.2.1: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Sasaran 4.2: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pendukung Produksi Pertanian
Ind Sasaran 4.2.1: Persentase peningkatan kelas kelompok
Program 4.2.1.1: PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
Sasaran 4.3: Meningkatnya Hasil Penanganan Bencana Pertanian
Ind Sasaran 4.3.1: Persentase peningkatan penanganan bencana pertanian
Program 4.3.1.1: PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Purwokerto, 3 Maret 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. JAKA BUDI SANTOSA, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19650606 199403 1 008

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2022
Periode Yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023
Urusan Pemerintahan	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	: URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	: NON URUSAN
OPD yang Dinilai	: DINPERTAN KP
Sumber Data	: Renstra
Tujuan Strategis	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama
	Meningkatnya Akses Pangan
	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan
	Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian
Program OPD (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
	a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN
	a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
	b. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
	3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
	a. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
	4. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
	a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
	5. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
	b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
	6. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	a. Pembangunan Prasarana Pertanian
	7. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
	a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
	8. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
	9 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	a. X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	b. X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	c. X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
	d. X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	e. X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	f. X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Keluaran/Hasil Kegiatan	Jumlah kelompok yang naik kelas Target: 118 Kelompok	
	Jumlah kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan Target: 1 Keg	
	Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian yang dilaksanakan Target: 3 Keg	
	Jumlah lokasi kemandirian pangan yang difasilitasi Target: 8 Lokasi	
	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola Target: 2 Jenis	
	Jumlah pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan yang dilaksanakan Target: 2 Keg	
	Jumlah administrasi umum yang dikelola Target: 6 Jenis	
	Jumlah barang milik daerah yang tersedia Target: 2 Jenis	
	Jumlah sampel bahan makanan hasil survey yang diuji Target: 100 sampel	
	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan Target: 3 Jenis	
	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Target: 2 Jenis	
	Jumlah kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dilaksanakan Target: 3 Keg	
	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani Target: 84 Desa	
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun Target: 3 Dokumen	
	Jumlah jenis pembangunan Infrastruktur di bidang pertanian yang dilaksanakan Target: 4 Jenis	
	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten yang dilaksanakan Target: 2 Keg	
Informasi Lain	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian	Kegiatan	Indikator
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi kemandirian pangan yang difasilitasi Target: 8 Lokasi
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dilaksanakan Target: 3 Keg
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan yang dilaksanakan Target: 2 Keg
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani Target: 84 Desa
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel bahan makanan hasil survey yang diuji Target: 100 sampel
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian yang dilaksanakan Target: 3 Keg

Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan Target: 1 Keg
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah jenis pembangunan Infrastruktur di bidang pertanian yang dilaksanakan Target: 4 Jenis
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten yang dilaksanakan Target: 2 Keg
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok yang naik kelas Target: 118 Kelompok
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun Target: 3 Dokumen
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola Target: 2 Jenis
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola Target: 6 Jenis
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia Target: 2 Jenis
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Target: 2 Jenis
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan Target: 3 Jenis

Purwokerto, 3 Maret 2023
 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN BANYUMAS

 Ir. JAKA BUDI SANTOSA, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650606 199403 1 008

Urusan Pemerintahan : Pertanian dan Pangan

[illegible]

3	Meningkatnya Keamanan Pangan	Persentase peningkatan jumlah sampel pangan yang diuji dalam rangka keamanan	Beredarnya bahan pangan yang tidak aman dikonsumsi	209	Kepala Dinperten KP	Kurangnya pengawasan keamanan pangan	Internal	C	Terganggunya kesehatan masyarakat	Masyarakat
4	Meningkatnya Diversifikasi Pangan	Persentase peningkatan komoditas pangan lokal yang dikembangkan	Kurangnya jenis komoditas pangan lokal yang dikembangkan	209	Kepala Dinperten KP	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penganeekaragaman pangan lokal	Eksternal	C	Ketergantungan terhadap pangan utama	Masyarakat
	Tujuan : Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian									
5	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Pertanian	Persentase peningkatan ketersediaan sarana pendukung produksi pertanian	Kurangnya ketersediaan sarana produksi pertanian yang berkualitas	327	Kepala Dinperten KP	Keterbatasan akses petani terhadap sarana produksi yang berkualitas	Internal	C	Produksi Pertanian kurang optimal	Masyarakat (Petani)
		Persentase peningkatan ketersediaan prasarana pendukung produksi	Tidak tersedianya air bagi lahan pertanian	327	Kepala Dinperten KP	Kurangnya ketersediaan jaringan irigasi tersier	Internal	C	Produksi Pertanian belum optimal	Masyarakat (Petani)
6	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pendukung Produksi Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok	Rendahnya kapasitas kelompok tani	327	Kepala Dinperten KP	Rendahnya pengetahuan tentang teknologi budidaya tanaman	Eksternal	C	Produksi pertanian belum optimal	Masyarakat (Petani)
7	Meningkatnya Hasil Penanganan Bencana Pertanian	Persentase peningkatan penanganan bencana pertanian	Tidak tertanganinya bencana pertanian akibat dampak perubahan iklim	327	Kepala Dinperten KP	Tingginya kejadian banjir dan kekeringan akibat perubahan iklim	Eksternal	UC	Terjadinya penurunan produksi dan gagal panen (puso)	Masyarakat (Petani)
			Tidak tertanganinya serangan OPT pada tanaman	327	Kepala Dinperten KP	Kurangnya deteksi dini terhadap serangan OPT	Internal	C	Tingginya kerusakan tanaman akibat serangan OPT sehingga terjadi gagal panen	Masyarakat (Petani)

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RESIKO OPERASIONAL

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
 Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : Renstra Perubahan 2018-2023
 Tujuan Strategis : 1. Meningkatnya ketersediaan pangan utama
 2. Meningkatnya akses pangan
 3. Meningkatnya pemanfaatan pangan
 4. Meningkatnya produksi tanaman pertanian
 Sasaran Strategis : 1. Meningkatnya Penguatan Cadangan Pangan
 2. Meningkatnya Penanganan Daerah rawan Pangan
 3. Meningkatnya Keamanan Pangan
 4. Meningkatnya Diversifikasi Pangan
 5. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Pertanian
 6. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pendukung Produksi Pertanian
 7. Meningkatnya Hasil Penanganan Bencana Pertanian
 Urusan Pemerintahan : Pertanian dan Pangan

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi kemandirian pangan yang difasilitasi	Cadangan pangan masyarakat kurang memadai	209	Kepala Bidang	Kurangnya Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes)	Eksternal	UC	Tidak terpenuhinya ketersediaan pangan bagi masyarakat	Masyarakat	DINPERTAN KP
2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani	Tidak tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan pangan /Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	209	Kepala Bidang	tidak tersedia data desa rawan pangan	Internal	C	Kurang terarahnya kegiatan penanganan desa rawan pangan	Masyarakat	DINPERTAN KP

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
3	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel bahan makanan hasil survey yang diuji	Tidak adanya Rekomendasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diterbitkan	209	Kepala Bidang	Kurangnya pengetahuan Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi dalam Negeri Usaha Kecil dan Mikro (PSAT-PDUK) untuk menjaga mutu dan keamanan pangan	Eksternal	C	Tidak terjaminnya keamanan dan mutu Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar	Masyarakat	DINPERTAN KP
			Masyarakat tidak mengetahui mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang beredar dan dikonsumsi	209	Kepala Bidang	Tidak adanya pengujian mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat	Internal	C	Tidak terjaminnya keamanan pangan yang beredar	Masyarakat	DINPERTAN KP
4	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan yang dilaksanakan	Tidak terpantaunya konsumsi pangan per kapita per tahun	209	Kepala Bidang	Kurangnya data konsumsi pangan per kapita per tahun	Internal	C	tidak adanya data untuk acuan perencanaan konsumsi pangan masyarakat	Masyarakat	DINPERTAN KP
5	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dilaksanakan	Pasokan dan harga pangan tidak stabil	209	Kepala Bidang	Tidak terlaksananya pasar murah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan	Internal	C	Menurunnya daya beli pangan, meningkatnya harga pangan, menurunnya akses masyarakat terhadap pangan	Masyarakat	DINPERTAN KP
			Tidak berkembangnya usaha pangan pada Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM)	209	Kepala Bidang	Kurangnya pembinaan dan bantuan operasional untuk pengembangan usaha pangan masyarakat	Eksternal	C	Tidak terserapnya gabah petani, tidak meratanya distribusi pangan dan terjadi ketidakstabilan harga pangan	Masyarakat	DINPERTAN KP
			Data stok, pasokan dan harga pangan tidak tersedia	209	Kepala Bidang	tidak terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan yang beredar di masyarakat/pasar	Internal	C	Ketersediaan dan ketsabilan harga pangan tidak terpantau	Masyarakat	DINPERTAN KP

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
6	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian yang dilaksanakan	Petani belum menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) pada budidaya tanaman	327	Kepala Bidang	Kurangnya pengetahuan petani, serta kurangnya sarana produksi	Eksternal	C	Produksi dan produktivitas tanaman tidak optimal	Masyarakat	DINPERTAN KP
7	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan	Terbatasnya ketersediaan benih unggul	327	Kepala Bidang	Belum adanya sumber benih yang digunakan sebagai tanaman induk	Internal	C	Produksi pertanian kurang optimal	Masyarakat (Petani)	DINPERTAN KP
8	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah jenis pembangunan Infrastruktur di bidang pertanian yang dilaksanakan	Tidak tersedianya Jalan Usaha Tani yang memadai	327	Kepala Bidang	Belum terfasilitasinya pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sesuai kebutuhan	Eksternal	UC	Rendahnya keuntungan usaha tani akibat mahal biaya pengangkutan sarana produksi maupun hasil panen	Masyarakat (Petani)	DINPERTAN KP
9	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok yang naik kelas	Peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan di Kecamatan dan Desa kurang optimal	327	Kepala Bidang	Fasilitas yang tersedia belum difungsikan secara optimal	Internal	C	Terhambatnya proses penyelenggaraan penyuluhan pertanian	Masyarakat	DINPERTAN KP
			Kurangnya fasilitas Gedung dan lahan demplot BPP	327	Kepala Bidang	Tidak tersedianya lahan /tanah yang merupakan aset Pemda	Eksternal	UC	Kegiatan Penyelenggaraan penyuluhan kurang optimal	Masyarakat	DINPERTAN KP
			Kapasitas Penyuluh Pertanian yang belum memadai	327	Kepala Bidang	Kurangnya pemahaman teknis pertanian akibat beragamnya latar belakang pendidikan	Internal	C	Kurang maksimalnya pembinaan terhadap petani	Masyarakat (Petani)	DINPERTAN KP

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
10	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten yang dilaksanakan	Ketergantungan petani terhadap pestisida kimia dalam penanggulangan serangan OPT	327	Kepala Bidang	Kurangnya pengetahuan tentang pengendalian serangan OPT	Internal	C	Tingginya akumulasi bahan kimia pada hasil pertanian	Masyarakat	DINPERTAN KP

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RESIKO STRATEGIS

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatnya ketersediaan pangan utama
 Meningkatnya akses pangan
 Meningkatnya pemanfaatan pangan
 Meningkatnya produksi tanaman pertanian
 Urusan Pemerintahan : Pertanian dan Pangan

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko	Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Cadangan Pangan pemerintah daerah kurang memadai	RSO.23 209 22 22	3.4	2.5	8.5
2	Tidak tertanganinya daerah rawan pangan	RSO.23 209 22 22	3.5	2.5	8.75
3	Beredarnya bahan pangan yang tidak aman dikonsumsi	RSO.23 209 22 22	3.2	2.5	8
4	Kurangnya jenis komoditas pangan lokal yang dikembangkan	RSO.23 209 22 22	2.8	2.7	7.56
5	Kurangnya ketersediaan sarana produksi pertanian yang berkualitas	RSO.23 327 22 22	3.1	2.6	8.06
6	Tidak tersedianya air bagi lahan pertanian	RSO.23 327 22 22	3.8	2.5	9.5
7	Rendahnya kapasitas kelompok tani	RSO.23 327 22 22	3.2	2.8	8.96
8	Tidak tertanganinya bencana pertanian akibat dampak perubahan iklim	RSO.23 327 22 22	3.2	2.6	8.32
9	Tidak tertanganinya serangan OPT pada tanaman	RSO.23 327 22 22	3.6	2.4	8.64

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RESIKO OPERASIONAL

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatnya ketersediaan pangan utama
 Meningkatnya akses pangan
 Meningkatnya pemanfaatan pangan
 Meningkatnya produksi tanaman pertanian
 Urusan Pemerintahan : Pertanian dan Pangan

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko	Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Tidak terpantaunya konsumsi pangan per kapita per tahun	ROO.23 209 22 22	2.6	2	5.2
2	Peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan di Kecamatan dan Desa kurang optimal	ROO.23 327 22 22	2.7	2.2	5.94
3	Tidak adanya Rekomendasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diterbitkan	ROO.23 209 22 22	2.5	1.7	4.25
4	Masyarakat tidak mengetahui mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang beredar dan dikonsumsi	ROO.23 209 22 22	3	2.9	8.7
5	Kurangnya fasilitas Gedung dan lahan demplot BPP	ROO.23 327 22 22	2.8	2.9	8.12
6	Kapasitas Penyuluh Pertanian yang belum memadai	ROO.23 327 22 22	2.8	2.8	7.84
7	Tidak tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas " FSVA)	ROO.23 209 22 22	3	1.9	5.7
8	Terbatasnya ketersediaan benih unggul	ROO.23 327 22 22	2.8	2.7	7.56
9	Ketergantungan petani terhadap pestisida kimia dalam penanggulangan serangan OPT	ROO.23 327 22 22	3	3.4	10.02
10	Pasokan dan harga pangan tidak stabil	ROO.23 209 22 22	2.9	2.8	10.2
11	Tidak berkembangnya usaha pangan pada Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM)	ROO.23 209 22 22	2.8	2.8	8.12

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko	Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
12	Data stok, pasokan dan harga pangan tidak tersedia	ROO.23 209 22 22	2.5	2.2	5.72
13	Petani belum menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) pada budidaya tanaman	ROO.23 327 22 22	2.6	2.9	7.54
14	Cadangan pangan masyarakat kurang memadai	ROO.23 209 22 22	2.9	2.8	8.12
15	Tidak tersedianya Jalan Usaha Tani yang memadai	ROO.23 327 22 22	2.8	2.7	7.56

FORMULIR KERTAS KERJA DAFTAR RESIKO STRATEGIS PRIORITAS

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
 Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : Renstra Perubahan 2018-2023
 Tujuan Strategis : 1. Meningkatnya ketersediaan pangan utama
 2. Meningkatnya akses pangan
 3. Meningkatnya pemanfaatan pangan
 4. Meningkatnya produksi tanaman pertanian
 Urusan Pemerintahan : Pertanian dan Pangan

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Tidak tertanganinya serangan OPT pada tanaman	RSO.23 327 22 22	8.64	DINPERTAN KP	Kurangnya deteksi dini terhadap serangan OPT	Tingginya kerusakan tanaman akibat serangan OPT sehingga terjadi gagal panen
2	Tidak tertanganinya daerah rawan pangan	RSO.23 209 22 22	8.75	DINPERTAN KP	Kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam penanganan daerah rawan pangan	Kurangnya maksimalnya penanganan daerah rawan pangan
3	Rendahnya kapasitas kelompok tani	RSO.23 327 22 22	8.96	DINPERTAN KP	Rendahnya pengetahuan tentang teknologi budidaya tanaman	Produksi pertanian belum optimal
4	Tidak tersedianya air bagi lahan pertanian	RSO.23 327 22 22	9.5	DINPERTAN KP	Kurangnya ketersediaan jaringan irigasi tersier	Produksi Pertanian belum optimal

FORMULIR KERTAS KERJA DAFTAR RESIKO OPERASIONAL PRIORITAS

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
 Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : Renstra Perubahan 2018-2023
 Tujuan Strategis : 1. Meningkatnya ketersediaan pangan utama
 2. Meningkatnya akses pangan
 3. Meningkatnya pemanfaatan pangan
 4. Meningkatnya produksi tanaman pertanian
 Urusan Pemerintahan : Pertanian dan Pangan

f

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Masyarakat tidak mengetahui mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang beredar dan dikonsumsi	ROO.23 209 22 22	08:07	DINPERTAN KP	Tidak adanya pengujian mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat	Tidak terjaminnya keamanan pangan yang beredar
2	Kurangnya fasilitas Gedung dan lahan demplot BPP	ROO.23 327 22 22	08:12	DINPERTAN KP	Tidak tersedianya lahan /tanah yang merupakan aset Pemda	Kegiatan Penyelenggaraan penyuluhan kurang optimal
3	Ketergantungan petani terhadap pestisida kimia dalam penanggulangan serangan OPT	ROO.23 327 22 22	10:02	DINPERTAN KP	Kurangnya pengetahuan tentang pengendalian serangan OPT	Tingginya akumulasi bahan kimia pada hasil pertanian
4	Pasokan dan harga pangan tidak stabil	ROO.23 209 22 22	08:12	DINPERTAN KP	Tidak terlaksananya pasar murah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan	Menurunnya daya beli pangan, meningkatnya harga pangan, menurunnya akses masyarakat terhadap pangan
5	Cadangan pangan masyarakat kurang memadai	ROO.23 209 22 22	08:12	DINPERTAN KP	Kurangnya Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes)	Tidak terpenuhinya ketersediaan pangan bagi masyarakat

KERTAS KERJA
PENILAIAN ATAS KERTAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN UNTUK LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2023

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
A PENEKAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA							
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2020	KE	1	Evaluasi kehadiran pegawai secara berkala setiap semester untuk deteksi dini keterlambatan yang melebihi batas	Sekretaris	Triwulan I, II, III, IV
2	Belum terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	Menyediakan akun media sosial Dinpartan KP sebagai media konsultasi dan pengaduan masyarakat	KE	1	Membentuk unit khusus untuk menangani pengaduan masyarakat dan ditetapkan dalam SK Kepala Dinas	Kepala Dinas	Semester II
D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN							
3	Masing-masing pihak dalam organisasi belum memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	Sosialisasi internal tentang Pemetaan Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian yang disisipkan dalam rapat	KE	1	Mengadakan sosialisasi khusus tentang Pemetaan Resiko strategis dan operasional dan Rencana Tindak Pengendaliannya bagi seluruh staf	Kepala Dinas	Triwulan II
4	Tidak adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	Mengadakan rapat evaluasi kegiatan yang dilaksanakan setiap triwulan	KE	1	Mengintensifkan rapat evaluasi kinerja untuk resiko resiko prioritas yang diampu oleh bidang	Kepala Dinas	Triwulan II, III, IV

KERTAS KERJA

PENILAIAN ATAS KERTAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN UNTUK RISIKO STRATEGIS

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Banyumas

Tahun Penilaian : 2023

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
1	Tidak tertanganinya serangan OPT pada tanaman	327	Melakukan Gerakan Pengendalian OPT	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang	Mengintensifkan Gerakan Pengendalian OPT dan sekolah lapang pengendalian hama terpadu	Kepala Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman	Triwulan IV
2	Tidak tertanganinya daerah rawan pangan	209	Pemberian bantuan paket sembako di desa rawan pangan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang	Koordinasi lintas bidang dan lintas sektoral untuk penanganan desa rawan pangan	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Triwulan IV
3	Rendahnya kapasitas kelompok tani	327	Melakukan pembinaan kelompok tani melalui Penyuluh Pertanian di wilayah binaannya	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang	Melakukan monitoring pembinaan kelompok tani di tiap BPP Kecamatan	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha	Triwulan III
4	Tidak tersedianya air bagi lahan pertanian	327	Fasilitasi pengusulan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier melalui anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan verifikasi lapangan bagi poktan pengusul, sehingga pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier tepat lokasi dan sesuai kebutuhan	Kepala Bidang Sarpras	Triwulan II

KERTAS KERJA

PENILAIAN ATAS KERTAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN UNTUK RISIKO OPERASIONAL

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian : 2023

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
1	Masyarakat tidak mengetahui mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang beredar dan dikonsumsi	209	Pengujian sampel pangan segera asal tumbuhan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Adanya tindak lanjut hasil pengujian sampel kepada pedagang dan masyarakat	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 tahun
2	Kurangnya fasilitas Gedung dan lahan demplot BPP	327	Pembangunan Gedung dan penyediaan lahan demplot BPP	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Koordinasi lintas sektoral dalam fasilitasi pembangunan gedung dan lahan demplot BPP	Kepala Bidang Penyuluhan dan Bina Usaha	1 tahun
3	Ketergantungan petani terhadap pestisida kimia dalam penanggulangan serangan OPT	327	Sosialisasi penggunaan pupuk organik	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Bimbingan Teknis/Pelatihan Pertanian Organik dan Pembuatan Pestisida Hayati	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura/Kepala Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman	1 tahun
4	Pasokan dan harga pangan tidak stabil	209	Pemantauan stok dan harga pangan secara kontinyu	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Koordinasi lintas sektoral dalam penanganan kurangnya stok dan fluktuasi harga pangan	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 tahun
5	Cadangan pangan masyarakat kurang memadai	209	Fasilitasi pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pembinaan pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 tahun

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
1	Mengintensifkan Gerakan Pengendalian OPT dan sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT)	Bimtek/Pelatihan/Sekolah Lapang	Dinpartan KP/ Penyuluh/POPT	Petani/Kelompok Tani	Trwiulan I, II, III, IV	-	Belum dilaksanakan
2	Koordinasi lintas bidang dan lintas sektoral untuk penanganan desa rawan pangan	Surat/Rapat Koordinasi	Dinpartan KP	Instansi terkait	Triulan I, II, III	-	Belum dilaksanakan
3	Melakukan monitoring pembinaan kelompok tani di tiap BPP Kecamatan	Monev kegiatan BPP	Dinpartan KP	BPP/Penyuluh	Triwulan II, III, IV	-	Belum dilaksanakan
4	Melakukan verifikasi lapangan bagi poktan pengusul, sehingga pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier tepat lokasi dan sesuai kebutuhan	Verifikasi CPCL kegiatan RJIT	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	Kelompok Tani	trwiulan I, II	-	Belum dilaksanakan

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Meningkatnya ketersediaan pangan utama Meningkatnya akses pangan Meningkatnya pemanfaatan pangan Meningkatnya produksi tanaman pertanian
Urusan Pemerintahan	: Pertanian dan Pangan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
1	Adanya tindak lanjut hasil pengujian sampel kepada pedagang dan masyarakat	Surat/Rapat/Sosialisasi	Dinpertan KP	Instansi terkait, masyarakat	Triwulan IV	-	Belum dilaksanakan
2	Koordinasi lintas sektoral dalam fasillitasi pembangunan gedung dan lahan demplot BPP	Surat/Rapat Koordinasi	Dinpertan KP	Instansi terkait	Triwulan IV	-	Belum dilaksanakan
3	Bimbingan Teknis/Pelatihan Pertanian Organik dan Pembuatan Pestisida Hayati	Bimtek/Pelatihan/Sekolah Lapang	Dinpertan KP	Petani	Triwulan III, IV	-	Belum dilaksanakan
4	Koordinasi lintas sektoral dalam penanganan kurangnya stok dan fluktuasi harga pangan	Surat/Rapat Koordinasi	Dinpertan KP	Instansi terkait	Triwulan I, II, III, IV	-	Belum dilaksanakan
5	Pembinaan pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat	Surat/Rapat/Pembinaan/Sosialisasi	Dinpertan KP	Gapoktan/LUPM	Triwulan III, IV	-	Belum dilaksanakan

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN RESIKO STRATEGIS

na Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
 n Penilaian : 2023
 an Strategis : Meningkatnya ketersediaan pangan utama
 Meningkatnya akses pangan
 Meningkatnya pemanfaatan pangan
 Meningkatnya produksi tanaman pertanian
 Pemerintahan : Pertanian dan Pangan

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang diperlukan	Penanggungjawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
1	Melakukan verifikasi lapangan bagi poktan pengusul, sehingga pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier tepat lokasi dan sesuai kebutuhan	Data hasil Verifikasi CP/CL Kegiatan pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Triwulan I, II		
2	Melakukan monitoring pembinaan kelompok tani di tiap BPP Kecamatan	Laporan pelaksanaan kegiatan Penyuluh di masing-masing BPP	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha	Triwulan II, IV		
3	Koordinasi lintas bidang dan lintas sektoral untuk penanganan desa rawan pangan	Laporan kegiatan penanganan daerah rawan pangan	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Triwulan II, IV		
4	Mengintensifkan Gerakan Pengendalian OPT dan sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT)	Laporan pelaksanaan kegiatan Gerdal OPT dan Pelatihan/Sekolah Lapang	Kepala Bidang Perkebunan dan Pelindungan Tanaman	Triwulan III, IV		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN RESIKO OPERASIONAL

na Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
 n Penilaian : 2023
 an Strategis : Meningkatnya ketersediaan pangan utama
 Meningkatnya akses pangan
 Meningkatnya pemanfaatan pangan
 Meningkatnya produksi tanaman pertanian
 Pemerintahan : Pertanian dan Pangan

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang diperlukan	Penanggungjawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
1	Pembinaan pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat	Konfirmasi persiapan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Triwulan III, IV		
2	Koordinasi lintas sektoral dalam penanganan kurangnya stok dan fluktuasi harga pangan	Risalah hasil rapat, data stok dan harga pangan	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Triwulan II, IV		
3	Bimbingan Teknis/Pelatihan Pertanian Organik dan Pembuatan Pestisida Hayati	Monev dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek/Pelatihan	Kepala Bidang Pertkebunan dan Perlindungan Tanaman	Triwulan II, IV		
4	Koordinasi lintas sektoral dalam fasillitasi pembangunan gedung dan lahan demplot BPP	Konfirmasi persiapan dan Risalah hasil rapat	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha	Triwulan IV		
5	Adanya tindak lanjut hasil pengujian sampel kepada pedagang dan masyarakat	Data hasil uji sampel, Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Triwulan IV		

**PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP UNTUK RESIKO STRATEGIS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
1	Tidak tertanganinya serangan OPT pada tanaman	RSO.21.327.22.22					Mengintensifkan Gerakan Pengendalian OPT dan sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT)	Triwulan IV		
2	Tidak tertanganinya daerah rawan pangan	RSO.21.209.22.22					Koordinasi lintas bidang dan lintas sektoral untuk penanganan desa rawan pangan	Triwulan IV		
3	Rendahnya kapasitas kelompok tani	RSO.21.327.22.22					Melakukan monitoring pembinaan kelompok tani di tiap BPP Kecamatan	Triwulan III		
4	Tidak tersedianya air bagi lahan pertanian	RSO.21.327.22.22					Melakukan verifikasi lapangan bagi poktan pengusul, sehingga pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier tepat lokasi dan sesuai kebutuhan	Triwulan II		

**PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP UNTUK RESIKO OPERASIONAL
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
1	Cadangan pangan masyarakat kurang memadai	ROO.21.209.22.22					Pembinaan pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat	1 tahun		
2	Ketergantungan petani terhadap pestisida kimia dalam penanggulangan serangan OPT	ROO.21.327.22.22					Bimbingan Teknis/Pelatihan Pertanian Organik dan Pembuatan Pestisida Hayati	1 tahun		
3	Kurangnya fasilitas Gedung dan lahan demplot BPP	ROO.21.327.22.22					Koordinasi lintas sektoral dalam fasilitasi pembangunan gedung dan lahan demplot BPP	1 tahun		
4	Masyarakat tidak mengetahui mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang beredar dan dikonsumsi	ROO.21.209.22.22					Adanya tindak lanjut hasil pengujian sampel kepada pedagang dan masyarakat	1 tahun		
5	Pasokan dan harga pangan tidak stabil	ROO.21.209.22.22					Koordinasi lintas sektoral dalam penanganan kurangnya stok dan fluktuasi harga pangan	1 tahun		